



EVALUASI KELAYAKAN PENERIMA BANTUAN PROGRAM RUMAH SEHAT LAYAK HUNI TERHADAP PEMILIK BANGUNAN DI KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU TAHUN 2017-2019 (STUDI KASUS DESA PULAU KOPUNG SENTAJO)

Zulpika¹, Ria Asmeri Jafra^{2*}

^{1,2}Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
E-mail : ¹zulpika01@gmail.com, ^{2*}ria.asmeri@gmail.com
Email Penulis Korespondensi: ria.asmeri@gmail.com

ABSTRAK

Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) tahun 2017-2019 merupakan program pengembangan perumahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau. Program ini berupaya untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat miskin akibat risiko sosial yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk tidak dapat hidup dalam kondisi wajar, berdasarkan hasil musyawarah masyarakat. Pada penelitian ini mengambil lokasi di Desa Pulau Kopung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya. Selanjutnya penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk mendeskripsikan suatu masalah serta upaya menggali lebih dalam tentang kelayakan penerima bantuan Program Rumah Sehat Layak Huni Terhadap pemilik bangunan. Sedangkan pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan kepustakaan, selanjutnya dalam analisa data dilakukan dengan tahapan reduksi data, display data dan verifikasi data.

Kata Kunci : Evaluasi, Bantuan Program, Rumah Sehat Layak Huni

1. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H UUD 1945, tempat tinggal merupakan salah satu hak dasar rakyat, oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rumah sebagai kebutuhan dasar manusia dapat meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, pembentukan watak, karakter dan keperibadian bangsa. Dalam rangka mengatasi permasalahan permukiman di Indonesia, begitu juga di Provinsi Riau. Salah satu arah kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam pemenuhan hak atas perumahan dengan meningkatkan ketersediaan rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin dan golongan rentan, mendukung arah kebijakan nasional dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni.

Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) tahun 2017-2019 merupakan program pengembangan perumahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau. Program ini berupaya untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat miskin akibat risiko sosial yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk tidak dapat hidup dalam kondisi wajar, berdasarkan hasil musyawarah masyarakat.

Berdasarkan data yang dirangkum dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PKPP) Provinsi Riau, lokasi program pengembangan perumahan, kegiatan pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi Riau tahun 2017-2019 sebanyak 6000 unit, yang berada pada 12 Kabupaten/Kota yaitu Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak dengan sasaran lokasi Kecamatan mengikuti ketentuan SK Bupati/Walikota.

Bantuan rumah sehat layak huni merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), khususnya di Provinsi Riau. Program pembangunan layak huni telah banyak dikembangkan oleh pemerintah. Meskipun demikian, pemenuhan kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih jauh dari harapan. Berdasarkan pengamatan penulis, ditemukan masih adanya ketidakcocokan atau tidak tepat sasaran penerima Program Rumah Sehat Layak Huni, khususnya di lingkungan rumah penulis di Kecamatan Sentajo Raya. Lebih lanjut, pendistribusian bantuan Program Rumah Sehat Layak Huni tidak tepat sasaran karena kuota

yang diminta oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dirasa masih sangat minim. Hal tersebut berimplikasi pada ketimpangan sosial yang terjadi antara masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dengan masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan (Meltesa Rapita, 2019). Jika di kaji lebih lanjut, masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan rumah yang tidak layak huni tersebut sebagiannya adalah masyarakat yang mampu membangun rumah sendiri dan tidak tergolong rumah yang tidak layak huni. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bantuan Program Rumah Sehat Layak Huni masih perlu dievaluasi. Di bawah ini Data jumlah KK Penerima bantuan Program Rumah Sehat Layak Huni Di Kecamatan Sentajo Raya Tahun 2017-2019. Melihat dari masalah tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Kelayakan penerima bantuan Program Rumah Sehat Layak Huni (RSLH), dimana penulis mengambil sampel pada masyarakat di Kecamatan Sentajo Raya khususnya di Desa Pulau Kopung Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian: Bentuk studi kasus karena merupakan realita kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Dan dengan pendekatan deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk mendeskripsikan suatu masalah disertai upaya menggali lebih dalam tentang kelayakan penerima bantuan Program Rumah Sehat Layak Huni terhadap pemilik bangunan (Meltesa Rapita, 2019). Waktu penelitian ini akan dilakukan pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 setelah keluarnya suatu surat penelitian dari Fakultas Teknik, Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS). Lokasi Penelitian adalah di Kecamatan Sentajo Raya. Lebih tepatnya di desa Pulau Kopung Sentajo. Pemilihan lokasi penelitian dengan alasan di Kecamatan Sentajo Raya terdapat permasalahan seperti yang sudah dijelaskan di latar belakang dan pemilihan desa yang dijadikan lokasi penelitian di Kecamatan Sentajo Raya dengan alasan karena desa-desa tersebut merupakan masyarakat yang telah menerima penyaluran bantuan Program Rumah Sehat Layak Huni. Sedangkan pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan kepustakaan, selanjutnya dalam analisa data dilakukan dengan tahapan reduksi data, display data dan verifikasi data.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Geografis

Desa Pulau Kopung Sentajo merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Desa Pulau Kopung Sentajo secara geografis dengan ekonomi terletak pada jalur tengah Sumatera dan berada dibagian selatan Provinsi Riau. Secara tofografi Desa Pulau Kopung Sentajo dapat dibagi atas daerah rendah, perbukitan bergelombang dan perbukitan tinggi. Dengan variasi sebagian besar merupakan satuan perbukitan bergelombang yaitu sekitar 30-150 diatas permukaan laut. Berdasarkan data yang tercatat bahwa Desa Pulau Kopung Sentajo memiliki jumlah penduduk \pm 2,358 Jiwa dengan Dusun memiliki 3 RT 3 dan RW 3. Desa Pulau Kopung Sentajo memiliki 3 dusun, yaitu dusun 1 Cengkeh, dusun 2 Tanurai dan dusun 3 Narosa. Desa Pulau Kopung Sentajo merupakan bagian desa dari Kenegrian Sentajo, dimana Kenegrian Sentajo memiliki 5 desa yaitu desa pulau komang sentajo, Muaro Sentajo, koto sentajo, kampong baru sentajo, dan pulau kopung sentajo. Desa Pulau Kopung Sentajo menghubungkan kota teluk kuantan – rengat. Desa Pulau Kopung Sentajo termasuk desa terkecil di dibandingkan dari kelima desa sentajo. Desa Pulau Kopung Sentajo terletak 15 km dari ibu kota teluk kuantan dengan jarak tempu dari desa Pulau Kopung Sentajo keteluk kuantan lebih kurang 20 menit.

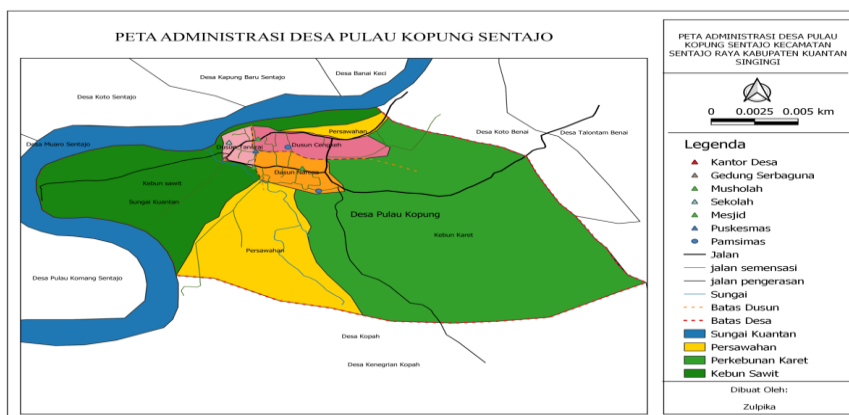
3.2 Kondisi Umum Wilayah

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Pulau Kopung Sentajo, terletak diantara :

Sebelah Utara : Sungai Kuantan
 Sebelah selatan : Sungai Kuantan / Desa Munsalo Kopah
 Sebelah Barat : Sungai Kuantan
 Sebelah Timur : Desa Koto Benai

Dibawah ini Peta Administrasi Desa Pulau Kopung Sentajo:



Gambar 1. Peta Administrasi Desa Pulau Kopung Sentajo

b) Orbitasi

Tabel 1. Orbitasi Desa Pulau Kopung Sentajo

NO	Tempat	Jarak/Waktu
1	Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	9 KM
2	Lama jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan	30 Menit
3	Jarak keibu kota kabupaten	16 KM
4	Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten	45 Menit

Sumber : Profil Desa Pulau Kopung Sentajo

c) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Kepala Keluarga	470 KK
2	Laki-Laki	909 Orang
3	Perempuan	873 Orang

Sumber : Profil Desa Pulau Kopung Sentajo

3.3 Sebaran Rumah Tidak Layak Huni Di Pulau Kopung Sentajo

Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin di Desa Pulau Kopung adalah terbatasnya akses perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan pemukiman dan lemahnya perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni perumahan yang layak dan sehat. Mereka umumnya tinggal di wilayah terbatasnya sarana sanitasi lingkungan, serta ketersediaan air bersih. Hal ini juga akan berpengaruh pada rendahnya tingkat kesehatan keluarganya. Menurut pendataan yang dilakukan pada tahun 2017, di Pulau Kopung Sentajo terdapat 29 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di Pulau Kopung Sentajo. Rincian jumlah sebaran rumah tidak layak huni yang terdapat pada tiap dusun di desa Pulau Kopung Sentajo, disajikan dalam Tabel 4.7 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Desa Pulau Sentajo di bawah ini.

Tabel 3. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Desa Pulau Kopung Sentajo

No	Wilayah Desa Pulau Kopung Sentajo	Data rumah tidak layak huni tahun 2017
1	Dusun Cengkeh	8 unit
2	Dusun Tanurai	7 unit
3	Dusun Narosa	14 unit
Total		29 unit

Sumber Data : Dinas PKPP,2017-2019

3.4 Data Penerima Bantuan Program Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Pulau Kopung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya

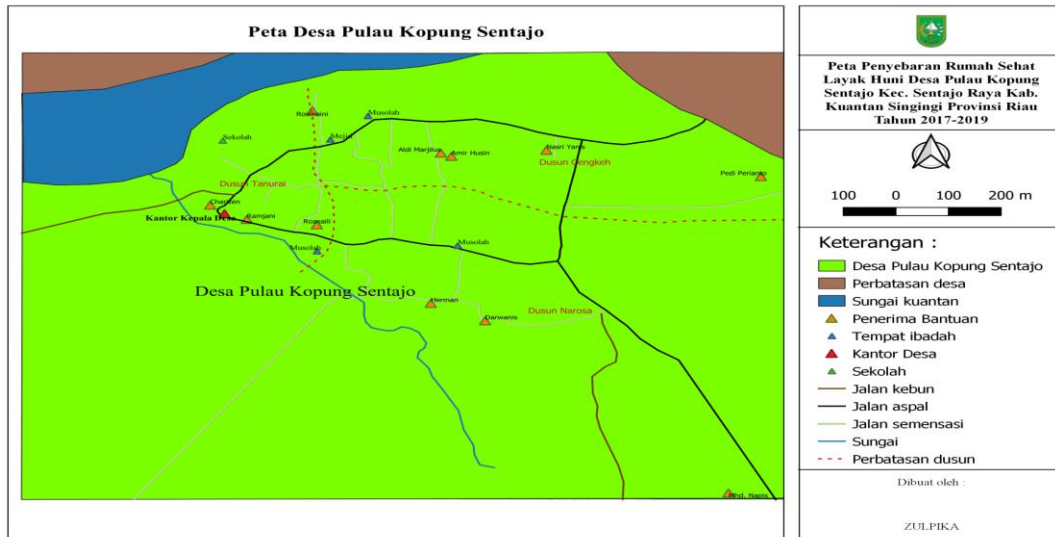
Di Kecamatan Sentajo Raya, di samping 63 unit Rumah Tidak Layak Huni yang mendapatkan bantuan melalui Program Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) yang dikelola oleh Dinas PKPP (Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan) di tahun 2017-2019. Dan diantara 63 unit yang tersebar di desa-desa kecamatan sentajo raya, salah satunya 11 unit di Desa Pulau Kopung Sentajo yang di bantu oleh Kelompok masyarakat atau Organisasi masyarakat (Pokmas/Oms) .

Tabel 4. Data Penerima RSLH Tahun 2017-2019

No	Nama	Tahun	Alamat/Dusun
1	Roslaini	2017	Tanurai
2	Amir Husin	2018	Cengkeh
3	Aldi Marjulis	2018	Cengkeh
4	Rosmaini	2018	Cengkeh
5	Nasri Yanis	2018	Cengkeh
6	Mhd.Napis	2018	Narosa
7	Cahrizen	2018	Tanurai
8	Ramjani	2018	Tanurai
9	Pedi Rianto	2018	Cengkeh
10	Herman	2018	Narosa
11	Darwanis	2018	Narosa

Sumber Data : Dinas PKPP,2017-2019

Dibawah ini peta yang menjelaskan tentang penyebaran bantuan program rumah sehat layak huni di Desa Pulau Kopung Sentajo.



Gambar 2. Peta Sebaran bantuan program rumah sehat layak huni di Desa Pulau Kopung Sentajo

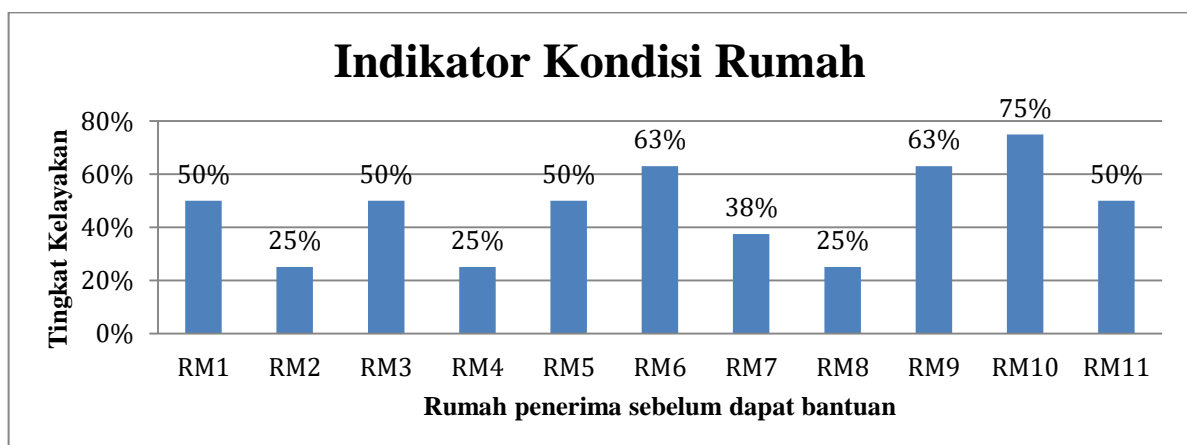
3.5 Hasil Evaluasi Rumah tidak Layak Huni di Desa Pulau Kopung Sentajo menurut UU no. 14 Tahun 2011

Dalam penelitian ini jumlah informan yang teliti sebanyak dua puluh sembilan orang terdiri dari 11 orang penerima bantuan RSLH dan tidak menerima bantuan sebanyak 18 orang di Desa Pulau kopung Sentajo. Berdasarkan penelitian selama dilapangan, maka peneliti akan menjabarkan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tabel evaluasi untuk menjawab permasalahan yang diambil, hasil wawancara dengan informan di Desa Pulau Kopung Sentajo tentang Evaluasi kelayakan penerima bantuan program rumah sehat layak huni terhadap pemilik bangunan di Desa Pulau Kopung Sentajo dibawah ini :

Tabel 5. Indikator Kondisi Rumah

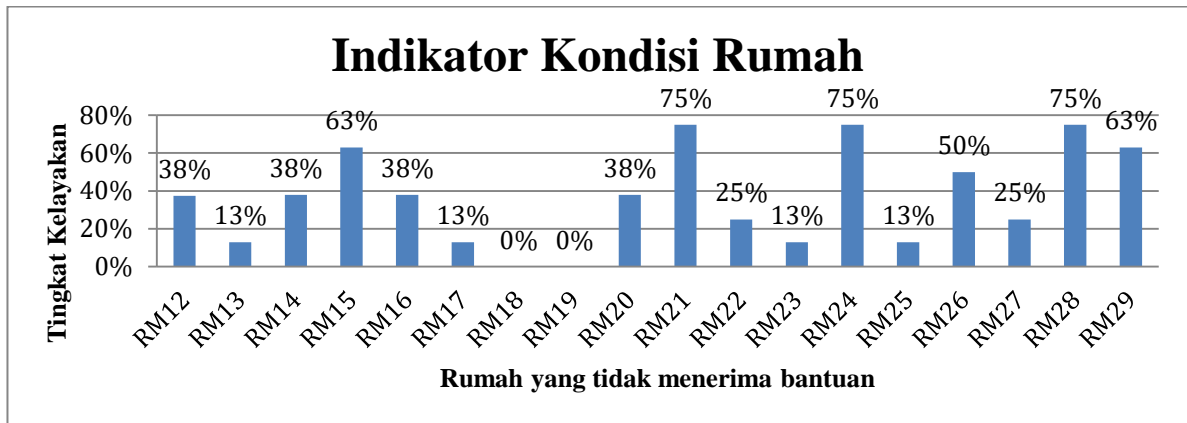
No	Indikator Kondisi Rumah
1	Luas lantai per kapita kota kurang dari empat meter persegi (4 m ²), dan kurang dari 10 m ² .
2	Sumber air tidak sehat
3	Tidak mempunyai akses MCK.
4	Bangunan tidak permanen.
5	Tidak mempunyai pencahayaan matahari dan ventilasi udara.
6	Tidak memiliki pembagian keruangan.
7	Lantai dari tanah dan rumah lembab/pengap.
8	Kondisi rusak.

Dibawah ini adalah hasil dari evaluasi rumah tidak layak huni di Desa Pulau Kopung Sentajo dengan indikator kondisi rumah menurut UU no.14 Tahun 2011.



Keterangan: RM = Rumah

Gambar 3. Diagram Kondisi Fisik Rumah Penerima Sebelum Mendapat Bantuan RSLH Di Desa Pulau Kopung Sentajo



Keterangan: RM = Rumah

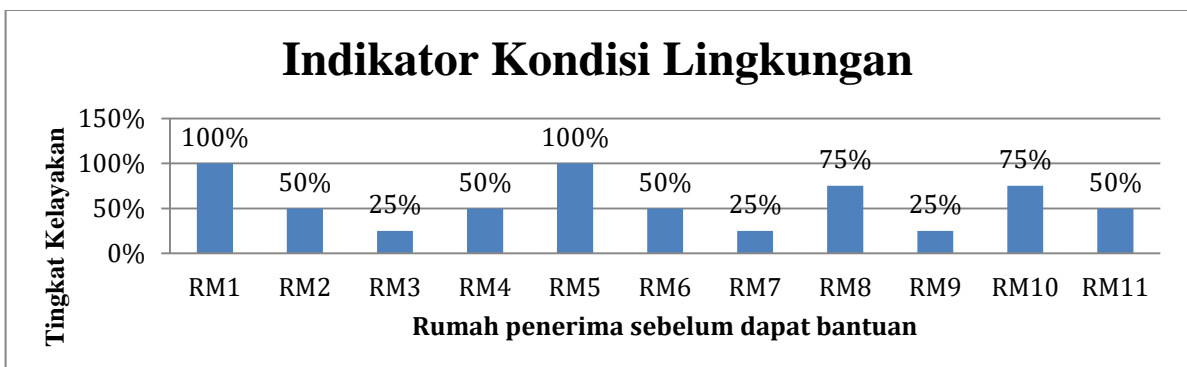
Gambar 4. Diagram Kondisi Fisik Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Pulau Kopung Sentajo

Dibawah ini adalah tabel evaluasi dengan indikator Kondisi Lingkungan menurut UU no.14 Tahun 2011.

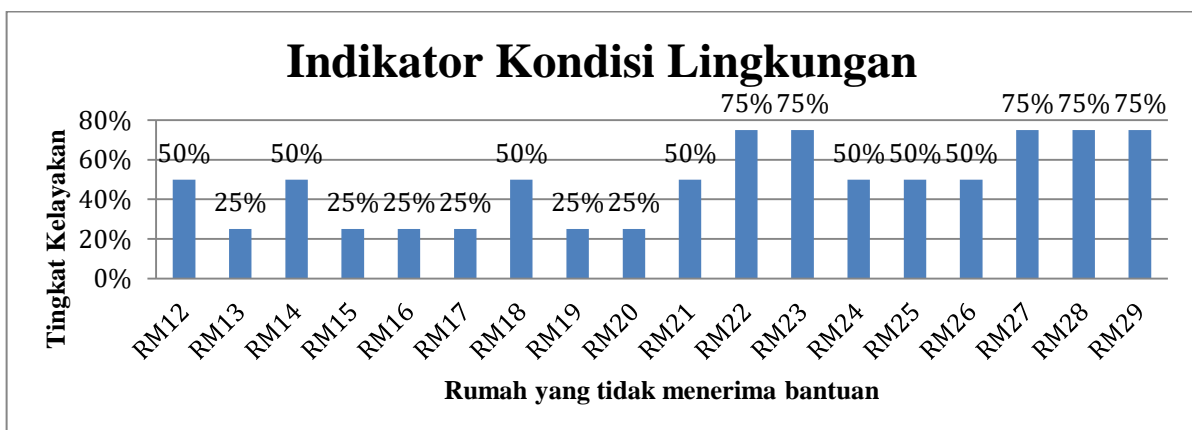
Tabel 6. Indikator Kondisi Lingkungan

No	Kondisi Lingkungan
1	Lingkungan kumuh dan becek.
2	Saluran pembuangan air tidak standart.
3	Jalan setapak tidak teratur.
4	Letak rumah tidak teratur dan berdempetan (padat)

Dibawah ini adalah hasil dari evaluasi rumah tidak layak huni di Desa Pulau Kopung Sentajo dengan indikator kondisi lingkungan menurut UU no.14 Tahun 2011.



Gambar 5. Diagram Kondisi Lingkungan Rumah Penerima Sebelum Mendapat Bantuan RSLH Di Desa Pulau Kopung Sentajo



Gambar 5. Diagram Kondisi Lingkungan Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Pulau Kopung Sentajo

3.6 Pembahasan

Evaluasi kesesuaian keadaan rumah sebelum pelaksanaan program dan kriteria calon penerima program RSLH berdasarkan kriteria yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No 14 Tahun 2011. Kriteria penerima bantuan Program Rumah Sehat Layak Huni dibagi menjadi dua bagian, yakni kriteria rumah yang termasuk kriteria kondisi rumah dan kondisi lingkungan selanjutnya kriteria calon penerima program RSLH berdasarkan data administrasi.

3.7 Analisis Penerima Bantuan Program RSLH Per Rumah

Berdasarkan data hasil penelitian dan perbandingan dengan kriteria rumah menurut Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No 14 Tahun 2011. Berikut pembahasan mengenai kesesuaian dan perbandingan hasil penelitian dan perbandingan dengan kriteria penerima bantuan Program Rumah Sehat Layak Huni menurut Permen No.14 Tahun 2011:

1) Rumah 1

Berdasarkan wawancara rumah 1, penerima atas nama Ibu Roslaini memiliki 7 orang anak dan sekarang mempunyai tanggungan 1 orang anak. Ibu Roslaini berusia 60 tahun dengan status janda, memiliki pekerjaan bertani dengan tidak berpenghasilan tetap sekitar penghasilan Rp 1.000.000/ bulan. Selanjutnya kondisi rumah sebelum mendapat bantuan , rumah ibu Roslaini tidak memiliki wc, untuk buang air kecil dan besar masih menumpang dirumah tetangga. Rumah ini memiliki jendela tapi tidak memiliki ventilasi dan fisik rumah bagian atas ternyata ada beberapa atap yang sudah bocor dan udara didalam rumah yang pengap dikarenakan ventilasi yang tidak ada. Dari kondisi lingkungan dulunya kumuh dan saluran airnya tidak memenuhi standar dan letak rumahpun berdempetan. Kelayakan menurut UU No 14 Tahun 2011 maka rumah ini dinyatakan layak menerima bantuan dengan tingkat kelayakan 75% berdasarkan 2 indikator yaitu kondisi fisik rumah dan kondisi lingkungan.



Gambar 6. Kondisi Rumah Ibu Roslaini Sesudah Mendapat Bantuan Program Rumah Sehat Layak Huni Tetap Dengan Lingkungan Rumah Yang Berdempetan

2) Rumah 2

Penerima bantuan atas nama bapak Amir Husin telah berusia 74 tahun. Beliau memiliki 7 orang anak dengan tidak memiliki tanggungan lagi, sekarang beliau tinggal bersama istrinya. Pekerjaan beliau adalah bertani dikebun sendiri, beliau berpenghasilan Rp 500.000/bulan. Sebelumnya mendapat bantuan rumah layak huni ia memiliki rumah yang berdinding papan dengan luas lantai 6 meter x 7 meter, memiliki pembagian ruangan seperti kamar tidur, ruang tamu dan dapur. Ternyata rumah ini memiliki kamar mandi dan tidak memiliki wc. Selanjutnya keadaan lingkungan rumah ini tidak memadai saluran pembuang air kotor, keadaan jalan setapak tidak beraturan dan jarak rumah ini dengan rumah tetangga masih jauh/tidak berdempetan. Dari 2 indikator menurut UU No.14 Tahun 2011 rumah ini tidak layak menerima bantuan karena mendapatkan tingkat kelayakan 38%.



Gambar 7. Kondisi rumah Bapak Amir Husin yang lama sesudah mendapat bantuan Program Rumah Sehat Layak Huni

Berdasarkan data hasil penelitian dan perbandingan kriteria rumah menurut Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No 14 Tahun 2011. Dapat dicermati dari kriteria kondisi rumah dan kondisi

lingkungan dari 11 rumah penerima bantuan RSLH, sebanyak 6 rumah yang sesuai dengan kondisi rumah dan lingkungan dengan persentase 50% - 75% dan 5 rumah yang tidak sesuai dengan persentase 31% - 44% sedangkan untuk rumah yang tidak layak huni di Desa Pulau Kopung Sentajo dari 18 rumah, sebanyak 7 rumah yang sesuai dengan kriteria kondisi rumah dengan persentase 50% - 75% dan 11 rumah yang tidak sesuai dengan persentase 13% - 44%.

4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis kondisi fisik rumah dan lingkungan, dari 11 rumah yang terpilih sebagai penerima bantuan RSLH sebanyak 6 rumah yang sesuai dan 5 rumah yang tidak sesuai dengan kriteria menurut UU No.14 Tahun 2011 sedangkan untuk rumah tidak layak huni atau masyarakat yang tidak menerima bantuan di Desa Pulau Kopung Sentajo dari 18 rumah, terdapat 7 rumah yang sesuai kriteria dan 11 rumah yang tidak sesuai kriteria menurut UU No.14 Tahun 2011.
2. Alasan masyarakat yang tidak terpilih sebagai penerima bantuan RSLH adalah karena tidak termasuk kriteria rumah tidak layak huni, rumah lama tidak bisa dirobohkan untuk lahan pembangunan, kurangnya persyaratan yang diajukan pemerintahan desa, dan tidak tau informasi dari pemerintahan desa.
3. Berdasarkan persebaran penerima bantuan Program Rumah Sehat Layak Huni, dapat disimpulkan persebaran cukup merata di tiga dusun di Desa Pulau Kopung Sentajo, dari 11 penerima yakni 5 penerima dari Dusun Cengek, 3 penerima dari Dusun Tanurai dan 3 penerima dari Dusun Narosa.

DAFTAR PUSTAKA

- AG. Subarsono. 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Dinas PKPP Provinsi Riau, 2017-2019.
- Dunn,William N. 2000. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Dwi Syam, Praditia Diva. 2017. Evaluasi Dampak Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Melalui Pola Bedah Kampung Di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013. Skripsi. Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- Khusnu Rizka, Ruli. 2010. Evaluasi Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Surakarta. Tugas Akhir. Fakultas Teknik, Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- M. K. Indonesia. Pengembangan Sistem Informasi Penilaian Rumah Sehat Untuk Evaluasi BidangPenyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Pontianak Information System Development Assessment Of Healthy House For the. vol. 4, no. 1, 2016.
- Musthofa, Zaini. 2011. Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Permukiman Kumuh. Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2003, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta:
- Permenpera RI No 14 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- Provinsi Riau. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024
- Rapita, Meltesa. 2019. Efektivitas Distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rsrtlh) Pada Masyarakat Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan (Studi Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (lain) Bengkulu.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011. Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Winarno, Bambang. 2018. Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Belitung. Jurnal Pengembangan Kota. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.